

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PENGELOLAAM KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**



**RENCANA KERJA
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia-Nya sehingga penyusunan Rancangan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Rancangan Rencana Kinerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 ini memuat program kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2021, serta Rencana Kerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 mendatang dengan mengakomodir kebutuhan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait lingkup Provinsi Jambi. Sehingga dapat menunjang Pembangunan Daerah Provinsi Jambi sesuai yang tertuang dalam RPJMD serta menjadi pedoman perangkat daerah maupun *stakeholder* yang membutuhkan.

Demikian, semoga Rancangan Recana Kerja ini dapat memberikan dukungan terhadap Peran dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.

Jambi, Januari 2022
KEPALA BADAN

**AGUS PIRNGADI,S.Sos
Pembina Utama Muda
Nip. 196912151990031005**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Maksud dan Tujuan	3
1.3.Landasan Hukum.....	4
1.4.Sistimatika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU	7
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra	7
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi	29
2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.....	35
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	37
3.1.Telaah Terhadap kebijakan Nasional.....	37
3.2.Tujuan dan sasaran.....	38
3.3.Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023.....	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
BAB V PENUTUP	50



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Tabel Program BPKPD	7
Tabel 2. 2. Tabel Capaian Program Dan Kegiatan BPKPD	13
Tabel 2. 3. Tabel Realisasi Belanja	25
Tabel 2. 4. Tabel Capain Indikator Utama.....	30
Tabel 2. 5. Capaian Kinerja Tahun 2019-2021.....	30
Tabel 2. 6. Tabel Kategori Mutu Pelayanan	32
Tabel 2. 7. NRR 9 Unsur Pelayanan	33
Tabel 2. 8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Per Unsur Layanan Semester II	34
Tabel 3. 1. Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran.....	39
Tabel 4. 1. Rumusan Rencana BPKPD Tahun Anggaran 2023 ..	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang disusun oleh perangkat Daerah yang berisi lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Program dan kegiatan pembangunan daerah harus diarahkan untuk mempercepat proses pembangunan, mempercepat peningkatan kecerdasan dan kemampuan bangsa, meningkatkan produktifitas dan efisiensi, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memelihara dan meningkatkan kualitas hidup.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan. Perencanaan merupakan penentuan tujuan yang ingin di capai. Dengan kata lain Perencanaan adalah suatu konsep dinamis dan fleksibel tentang persoalan masa depan, yang intinya memuat beberapa pilihan atau alternative program prioritas, optimalisasi alokasi sumberdaya yang tersedia dan efesiensi.

Dalam suatu progres kegiatan pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dapat mencapai hasil yang berdaya guna dan berhasil guna, apabila fungsi-fungsi dari management seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perencanaan sebagai salah satu dari fungsi management memiliki fungsi yang sama strategisnya dibandingkan dengan fungsi-fungsi management yang lainnya. Karena Perencanaan dapat dijadikan sebagai alat yang tepat untuk mengendalikan pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.



Oleh karena itu perencanaan suatu kegiatan menjadi sangat penting, karena kita dihadapkan pada suatu kondisi dimana kebutuhan yang diinginkan tidak terbatas, sementara sumber daya yang ada (sumber daya alam, sumber daya buatan dan SDM) terbatas, sehingga kita harus memilih beberapa alternatif dan skala prioritas. Bila kita dihadapkan dengan kondisi yang demikian itu, maka perencanaan mutlak untuk dijadikan sebagai bahan mencapai tujuan. Ada 3 (tiga) ciri-ciri perencanaan yang baik yaitu :

1. Perencanaan harus bersifat rasional, yaitu perencanaan dibuat berdasarkan pemikiran dan perhitungan secara cermat, logis dan dapat di operasionalkan.
2. Perencanaan bersifat fleksibel, berarti luwes, dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan apapun dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi.
3. Perencanaan bersifat kontinyu, artinya perencanaan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, baik dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Untuk mewujudkan realita pembangunan yang terarah, tepat sasaran, rasional, akomodatif, berdaya guna dan berhasil guna serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat/anggota, maka perlu diadakan perencanaan yang dimulai dari bawah (*bottom up*) atau dikenal dengan perencanaan partisipatif yaitu perencanaan dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Sehingga hasil pembangunan yang kita laksanakan dapat memberikan konstribusi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat banyak dan anggota organisasi.

Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sangat dibutuhkan dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan seluruh *stakeholders*. Oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai salah satu *stakeholder* kunci perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui



penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi melalui proses dan tahapan (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan rancangan awal; (3) Penyusunan rancangan; (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah; (5) Perumusan rancangan akhir; dan (6) Penetapan.

Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikuti sertakan seluruh pemangku kepentingan, proses top-down dan proses bottom-up secara berjenjang dan selanjutnya disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten, Provinsi maupun Nasional sesuai dengan kewenangannya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai pedoman dan rumusan dalam menentukan arah kebijakan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan Visi dan Misi dalam menunjang program pembangunan Kepala Daerah sehingga terjadi Sinergisitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan sehingga tercapai hasil yang terukur sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi dengan menggunakan sumber daya dan kemampuan yang ada.



1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang



- Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 tahun 2009 tentang RPJP 2005-2025;
 16. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penyusunan



Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKPD Provinsi Jambi

Bab III Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
- 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Lampiran



BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun lalu diperlukan sebagai bahan penyusunan Renja tahun 2023. Dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan tahun lalu, sebagian besar sudah dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan, adapun program kerja dan kegiatan yang terdapat di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi untuk tahun Anggaran 2021 melaksanakan **3 Program, 15 Kegiatan dan 54 Subkegiatan** untuk memenuhi **3 sasaran stratejik**. Untuk melaksanakan semua program dan kegiatan disediakan anggaran sebesar Rp. **1.042.561.407.815,-** yang terdiri dari :

Tabel 2. 1. Tabel Program BPKPD

No	Nama Program	Pagu Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Rp. 90.087.891.643,-
2	Program Pengelolaan keuangan Daerah	Rp. 939.668.856.381,-
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 12.804.659.791,-

Dengan realisasi **Rp. 951.108.726.678,- atau sebesar 91,23%**.

Sasaran pembangunan yang berhasil dicapai adalah :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana kantor yang memadai;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM yang profesional sesuai dengan bidang pekerjaannya;
3. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak kendaraan bermotor, ;
4. Terselenggaranya koordinasi antara Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dengan beberapa Dinas di Provinsi lainnya;

Dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi terdapat 3 program pelaksanaan



urusan pemerintah daerah. Selama tahun 2021 telah diupayakan pelaksanaan program tersebut yaitu:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.
4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.
5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.



4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

5. Fasilitasi Kunjungan Tamu.

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

4. Program Pengelolaan keuangan Daerah.

9. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.

2. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

3. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.

4. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan.

5. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.

6. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi.



10. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota.
2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
3. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
4. Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

11. Koordinasi dan Pengelolaan Perpendaharaan Daerah

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
3. Penatausahaan Pembiayaan Daerah.
4. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.

12. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban.
2. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi.



3. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.
5. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.

13. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

1. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi.

14. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi.
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

15. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
4. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
5. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah.
6. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian program dan kegiatan 96.71% dalam arti semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Tujuan Strategis

1. Meningkatkan kualitas SDM, Sarana dan Prasarana perkantoran, kualitas kelembagaan, tata laksana dan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang bersih, transparan, akuntabilitas dan partisipatif.
3. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah.
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari seluruh Program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2021 , berdasarkan hasil evaluasi kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, program dan kegiatan tersebut terlihat dan tergambar dalam tabel 2.2., sedangkan realisasi Belanja tergambar pada tabel 2.3. berikut :



Tabel 2. 2. Tabel Capaian Program dan Kegiatan BPKPD

KODE		Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Th.	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	11 Dokumen		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan	6 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	13 Dokumen	216,7
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	5 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	11 Dokumen	220

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi**



		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Periode Penyediaan Gaji	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100%	14 Bulan	42 Bulan	300
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Periode pembayaran honorarium penatausahaan keuangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	300
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	300
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	18 Dokumen	300
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jenis BMD yang diasuransikan	43 BMD	43 BMD	43 BMD	43 BMD	100%	43 BMD	139 BMD	300
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Milik Pemerintah Provinsi Jambi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah OPD yang dibina	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	100%	43 OPD	129 OPD	300
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 Dokumen	300

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi**



			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Percentase Kontribusi Pemamfaatan Barang Milik Daerah terhadap PAD dan tersediannya Dokumen Penghapusan dan Pemindahantanganan Aset/BMD Pemprov Jambi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	10 Asn	20 Asn	20 Asn	10 Asn	100%	10 Asn	50 Asn	500
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas	310 Stel	270 Stel	275 Stel	275 Stel	100%	275 Stel		
			Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan								
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dn Prasarana								
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase penyelesaian pelayanan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	768	530 Komponen	560 Komponen	560 Komponen	100%	560 Komponen	1773 komponen	230,9

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi**



			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor					100%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Lohsistik Kantor	92%	92%	92%	92%	100%	92%	276%	300
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	6 Bahan Bacaan	6 Bahan Bacaan	6 Bahan Bacaan	6 Bahan Bacaan	100%	6 Bahan Bacaan	18 Bahan Bacaan	300
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu	100 Tamu	100 Tamu	100 Tamu	100 Tamu	100%	100 Tamu	300 Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	40 Kali	36 kali	36 kali	36 kali	100%	36 kali	107 kali	267,5
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95 Unit	68 Unit	80 Unit	80 Unit	100%	80 Unit	231 Unit	243,2
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			22 Unit	22 Unit	100%	22 Unit	22 Unit	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi**



			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase penyelesaian jasa penunjang urusan perangkat daerah								
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat kantor	1100 Surat	836 Surat	950 Surat	1000 Surat	100%	1000 Surat	2821 Surat	256,5
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Pembayaran Rekening	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	300
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	300
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase pemeliharaan barang milik daerah								
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan(unit)	302 Unit	280 Unit	302 Unit	302 Unit	100%	302 Unit	884 Unit	292,7
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara (unit)	300 Unit	300 Unit	300 Unit	300 Unit	100%	300 Unit		300
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100%	100 Unit	300 Unit	300
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	12 Gedung	11 Gedung	11 Gedung	11 Gedung	100%	11 Gedung	33 Gedung	275

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi**



		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK								
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu								
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen	4 Dokumen							
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD	2 Pergub dan 2 Perda	100%	2 Pergub dan 2 Perda	6 pergun dan 6 Perda	300			
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang disusun	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	100%	1 Regulasi	3 Regulasi	300
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	11 Koordians i							
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	11 Koordians i							
		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah OPD yang dibina	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	100%	43 OPD	192 OPD	300
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD Kab/Kota yang disusun tepat waktu								
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kab/Kota	Jumlah Keputusan Gubernur Jambi tentang Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota	11 SK	11 SK	11 SK	11 SK	100%	11 SK	33 SK	300

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi**



			Penjabaran APBD Kabupaten/Kota									
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Gubernur Jambi tentang Hasil Evaluasi Perubahan APBD Kab/Kota	11 SK	11 SK	11 SK	11 SK	100%	11 SK	33 SK	300
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi	11 Evalausi	11 Evalausi	11 Evalausi	11 Evalausi	100%	11 Evalausi	33 Evaluasi	300
			Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKPD dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	11 LKPD	11 LKPD	11 LKPD	11 LKPD	100%	11 LKPD	33 LKPD	300
			Koordinasi dan Pengelolaan Perpendaharaan Daerah	Persentase penyelesaian administrasi Perpendaharaan Daerah								
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	100%	43 OPD	129 OPD	300
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Anggaran Kas dan SPD yang diterbitkan	5000 SPD	5000 SPD	5000 SPD	5000 SPD	100%	5000 SPD	1500 SPD	300

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi**



			Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Koordinasi	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali	12 Kali	300
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	300
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Percentase penyelesaian administrasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan -LO, dan Beban	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan beban yang dilaksanakan	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	100%	43 OPD		300
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah perda dan perkada penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Perda dan Perkada	100%	1 Perda dan Perkada	3 Perda dan Perkada				
			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen TLHP BPK	1 Dokumen							

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi**



		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen	2 Dokumen						
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis perasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Kebijakan dan Panduan Teknis yang disusun	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	100%	1 kebijakan	3 kebijakan
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					100%		
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Dana Darurat dan Mendesak yang disalurkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Persentase penyaluran Dana bagi Hasil Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah	jumlah PD yang dibina	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	100%	43 OPD	129 OPD

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi**



			Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi									
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH									
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jambi	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	100%	43 OPD	129 OPD	300
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Periode Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Jambi	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	300
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Periode Standar BMD dan Standar Kebutuhan BMD Pemerintah Provinsi Jambi	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	300
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Perioe RKBMD Pemerintah Provinsi Jambi	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	300
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penatausahaan BMD OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	100%	43 OPD	129 OPD	300
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Inventarisasi BMD OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	100%	43 OPD	129 OPD	300
			Pengamanan Barang Milik Daerah	-Jumlah Pengamanan BMD Pemerintah Provinsi Jambi	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	100%	43 OPD	129 OPD	300
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Hasil Penilaian BMD Pemerintah Provinsi Jambi	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	100%	43 OPD	129 OPD	300
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Monitoring dan Evaluasi BMD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	100%	43 OPD	129 OPD	300

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi



		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	100%	43 OPD	129 OPD	300
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi BMD OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	100%	43 OPD	129 OPD	300
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan BMD Pemerintah Provinsi Jambi	43 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	100%	43 OPD	129 OPD	300
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan, Sosialisasi/Rakor/Bimtek Pengelolaan BMD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kab/Kota Dalam Provinsi Jambi	Pem Prov dan Kab.kota	100%	Pem Prov dan Kab.kota	Pem Prov dan Kab.kota	300			
								100%			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah					100%			
								100%			
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Daerah yang diolah					100%			
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah laporan	12 Laporan				100%			
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100%	12 Kali	36 Kali	

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi**



		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis penyediaan Sarana dan Prasarana pada UPTD PPD	11 Kab/kota	11 Kab/kota	11 Kab/kota	11 Kab/kota	100%	11 Kab/kota	11 Kab/kota	
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Kab/kota dengan Sistem Kesamsatan yang dipelihara	11 Kab/kota	11 Kab/kota	11 Kab/kota	11 Kab/kota	100%	11 Kab/kota	11 Kab/kota	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah pelayaan penerimaan PBBKB, PAP dan Pajak Rokok	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%	12 kali	36 Kali	
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan	4 Triwulan	4 Triwulan	4 Triwulan	4 Triwulan	100%	4 Triwulan	12 Triwulan	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah PD Pengelolaan Retribusi Daerah yang dibina dan diawasi	18 OPD	18 OPD	18 OPD	18 OPD	100%	18 OPD	54 OPD	



Tabel 2. 3. Tabel Realisasi Belanja

DAFTAR REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPPK)
KEGIATAN APBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2021
(POSISI : BULAN DESEMBER 2021)

NO	SKPD/NAMA PROGRAM/ URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DPA			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN			SISA ANGGARAN Rp.
		APBD MURNI Rp.	PERUBAHAN Rp.	JUMLAH TOTAL Rp.	REALISASI KEUANGAN		FISIK(%)	
					Rp.	%	REAL	
BADAN KEUANGAN DAERAH								
BELANJA		133.561.757.600,00	27.723.309.050,00	107.077.884.000,00	85.416.981.504,00	79,77	99,95	21.660.902.496,00
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		479.667.239,00	60.628.586	419.038.653,00	404.482.028,00	96,97	100,00	14.556.625,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	214.278.746,00	60.628.586	153.650.160,00	151.610.835,00	98,67	100,00	2.039.325,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	265.388.493,00	-	265.388.493,00	252.871.193,00	95,28	100,00	12.517.300,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		93.776.922.742,00	17.494.209.352,00	76.683.521.274,00	58.359.693.802,00	76,10	100,00	18.323.827.472,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	92.937.172.008,00	17.280.285.952	75.656.886.056,00	57.382.152.446,00	75,85	100,00	18.274.733.610,00
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	754.118.420,00	200.403.942	954.522.362,00	915.064.705,00	95,87	100,00	39.457.657,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	85.632.314,00	13.519.458	72.112.856,00	62.476.651,00	86,64	100,00	9.636.205,00
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		5.897.205.775,00	1.657.561.701	4.239.644.074,00	3.253.802.840,00	76,75	100,00	985.841.234,00
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	550.000.681,00	192.720.773	357.279.908,00	313.127.379	87,64	100,00	44.152.529,00
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.072.216.566,00	453.353.740	1.618.862.826,00	1.186.165.142	73,27	100,00	432.697.684,00
3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	214.996.484,00	25.229.000	189.767.484,00	186.857.621	98,47	100,00	2.909.863,00
4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	899.999.389,00	316.373.800	583.625.589,00	490.515.244	84,05	100,00	93.110.345,00
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	899.996.387,00	199.943.988	700.052.399,00	525.388.913,00	75,05	100,00	174.663.486,00
6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.259.996.268,00	469.940.400	790.055.868,00	551.748.541,00	69,84	100,00	238.307.327,00
5. Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah		51.870.000,00	21.254.000	30.616.000,00	26.108.400,00	85,28	100,00	4.507.600,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.870.000,00	21.254.000	30.616.000,00	26.108.400,00	85,28	100,00	4.507.600,00
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.015.764.558,00	464.693.349	2.725.807.209,00	2.572.326.508,00	94,37	100,00	153.480.701,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	232.400.000,00	-	232.400.000,00	223.995.077,00	96,38	100,00	8.404.923,00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi



2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	774.005.788,00	176.087.369	597.918.419,00	546.130.588,00	91,34	100,00	51.787.831,00
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.313.941.690,00	89.530.980	1.224.410.710,00	1.185.537.750,00	96,83	100,00	38.872.960,00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	133.790.080,00	7.052.000	140.842.080,00	98.816.680,00	70,16	100,00	42.025.400,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	144.600.000,00	80.316.000	224.916.000,00	223.297.248,00	99,28	100,00	1.618.752,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	417.027.000,00	111.707.000	305.320.000,00	294.549.165,00	96,47	100,00	10.770.835,00
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.505.659.628,00	184.668.633	1.690.328.261,00	1.523.174.924,00	90,11	100,00	167.153.337,00
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.505.659.628,00	184.668.633	1.690.328.261,00	1.523.174.924,00	90,11	100,00	167.153.337,00
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.295.693.332,00	86.276.260	2.305.528.172,00	2.276.184.105,00	98,73	100,00	29.344.067,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	67.643.900,00	7.342.580	60.301.320,00	56.500.000,00	93,70	100,00	3.801.320,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.311.771.300,00	48.055.550	1.359.826.850,00	1.341.687.006,00	98,67	100,00	18.139.844,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	916.278.132,00	30.878.130	885.400.002,00	877.997.099,00	99,16	100,00	7.402.903,00
9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.581.731.000,00	1.588.323.000	1.993.408.000,00	1.670.547.428,00	83,80	100,00	322.860.572,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.487.240.000,00	495.730.000	991.510.000,00	796.816.482,00	80,36	100,00	194.693.518,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	336.070.000,00	31.387.000	304.683.000,00	254.310.474,00	83,47	100,00	50.372.526,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.758.421.000,00	1.061.206.000	697.215.000,00	619.420.472,00	88,84	100,00	77.794.528,00
10.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.763.652.748,00	1.047.002.519	1.716.650.229,00	1.492.391.232,00	86,94	100,00	224.258.997,00
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	296.502.250,00	115.957.500	180.544.750,00	177.931.919,00	98,55	100,00	2.612.831,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.532.665.150,00	461.851.000	1.070.814.150,00	972.144.909,00	90,79	100,00	98.669.241,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	239.989.764,00	239.989.764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	196.166.884,00	75.705.255	120.461.629,00	43.475.178	36,09	100,00	76.986.451,00
5	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	292.000.000,00	85.625.000	206.375.000,00	170.870.877,00	82,80	100,00	35.504.123,00
6	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	206.328.700,00	67.874.000	138.454.700,00	127.968.349,00	92,43	100,00	10.486.351,00
11.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	939.798.651,00	289.913.257	649.885.394,00	536.418.309,00	82,54	100,00	113.467.085,00
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	285.249.448,00	16.017.700	269.231.748,00	226.365.300,00	84,08	100,00	42.866.448,00
2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	235.459.372,00	108.735.132	126.724.240,00	102.670.800	81,02	100,00	24.053.440,00
3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	221.819.906,00	92.731.025	129.088.881,00	103.734.959	80,36	100,00	25.353.922,00

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi**



4	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	197.269.925,00	72.429.400	124.840.525,00	103.647.250,00	83,02	100,00	21.193.275,00
12. Koordinasi dan Pengelolaan Perpendaharaan Daerah		1.273.582.274,00	339.013.612	934.568.662,00	777.713.285,00	83,22	100,00	156.855.377,00
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	242.475.472,00	74.305.002	168.170.470,00	144.943.992	86,19	100,00	23.226.478,00
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	364.164.720,00	58.851.110	305.313.610,00	255.353.262,00	83,64	100,00	49.960.348,00
3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	507.708.902,00	187.795.500	319.913.402,00	265.103.996,00	82,87	100,00	54.809.406,00
4	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	159.233.180,00	18.062.000	141.171.180,00	112.312.035,00	79,56	100,00	28.859.145,00
13. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		704.588.527,00	313.348.600	589.683.127,00	438.283.300,00	74,33	100,00	151.399.827,00
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO,dan Beban	153.265.400,00	38.135.000	115.130.400,00	88.665.100,00	77,01	100,00	26.465.300,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	276.933.050,00	77.100.000	199.833.050,00	164.350.200,00	82,24	100,00	35.482.850,00
3	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	103.475.935,00	-	103.475.935,00	76.016.250,00	73,46	100,00	27.459.685,00
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	55.048.100,00	99.221.600	154.269.700,00	92.829.500,00	60,17	100,00	61.440.200,00
5	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	115.866.042,00	98.892.000	16.974.042,00	16.422.250,00	96,75	100,00	551.792,00
15. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		395.467.154,00	100.922.000	294.545.154,00	258.922.606,00	87,91	100,00	35.622.548,00
1	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	395.467.154,00	100.922.000	294.545.154,00	258.922.606,00	87,91	100,00	35.622.548,00
2. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		971.680.900.997,00	236.044.516.708	935.483.523.815,00	865.691.745.174,00	95,22	100,00	69.791.778.641,00
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	93.720.000.000,00	-	93.720.000.000,00	93.720.000.000,00	100,00	100,00	0,00
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	260.345.822.301,00	136.120.946.945	124.224.875.356,00	54.433.096.715,00	43,82	100,00	69.791.778.641,00
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	617.615.078.696,00	99.923.569.763	717.538.648.459,00	717.538.648.459,00	100,00	100,00	0,00
16. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		16.880.153.972,00	4.075.494.181	12.804.659.791,00	11.826.932.737,00	92,36	99,28	977.727.054,00
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	995.923.066,00	523.832.050	472.091.016,00	451.806.996,00	95,70	100,00	20.284.020,00
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6.544.215.335,00	2.882.908.202	3.661.307.133,00	3.460.613.489,00	94,52	100,00	200.693.644,00
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4.627.169.204,00	158.215.705	4.468.953.499,00	3.957.040.440,00	88,55	100,00	511.913.059,00

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi**



4	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3.107.947.335,00	80.600.000	3.027.347.335,00	3.026.459.914,00	99,97	100,00	887.421,00
5	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	566.595.708,00	198.298.046	368.297.662,00	196.386.084,00	53,32	95,00	171.911.578,00
6	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	465.848.196,00	121.083.500	344.764.696,00	331.562.364,00	96,17	100,00	13.202.332,00
7	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	572.455.128,00	110.556.678	461.898.450,00	403.063.450,00	87,26	100,00	58.835.000,00
JUMLAH TOTAL BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG		1.105.242.658.597,00	263.767.825.758,00	1.042.561.407.815,00	951.108.726.678,00	91,23	99,97	91.452.681.137,00



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
- e. Pelaksanaan tugas di bidang pajak daerah, retribusi, bagi hasil dan pendapatan lain-lain, anggaran, akutansi, pembinaan APBD kabupaten/kota, bendahara umum daerah (BUD) dan sistem informasi keuangan daerah;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang Tugasnya

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah pada tahun 2021 dapat dilihat dalam Tabel Capaian Indikator Utama sebagai berikut :



Tabel 2. 4. Tabel Capain Indikator Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian kinerja
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Tranparansi dan akutabilitas kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil Audit BPK terhadap laporan Keuangan Daerah	100%	NA
		Persentase Kab/Kota yang mendapat WTP	100 %	90.90 %
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Porsi PAD terhadap Penerimaan Daerah	5 %	4,91 %
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akutabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	72	75,11
		Nilai IKM	85	86,56

Dalam pengukuran kinerja transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tahun 2021 akan digambarkan dengan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 sampai tahun 2021 dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 5. Capaian Kinerja Tahun 2019-2021

No	KABUPATEN	CAPAIAN KINERJA 2019	CAPAIAN KINERJA 2020	CAPAIAN KINERJA 2021
1	2	3	4	5
	KOTA JAMBI	WTP	WTP	NA
	MUARO JAMBI	WTP	WTP	NA
	BATANG HARI	WTP	WTP	NA
	TANJUNG JABUNG BARAT	WTP	WTP	NA
	TANJUNG JABUNG TIMUR	WTP	WTP	NA
	BUNGO	WTP	WDP	NA
	TEBO	WTP	WTP	NA
	SAROLANGUN	WTP	WTP	NA
	SUNGAI PENUH	WTP	WTP	NA
	KERINCI	WTP	WTP	NA
	MERANGIN	WTP	WTP	NA
	JUMLAH PERSENTASE.....	100 %	90,90 %	-



Pengukuran tingkat capain kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indicator kinerja untuk tahun 2019 dan 2021 , hasil perbandingan tersebut diperoleh opini dan persentase pencapaian target, berdasarkan table diatas indicator dicapai alah opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Provinsi Jambi dimana opini BPK Perwakilan Provinsi jambi dari Tahun 2019 sebanyak 11 Kabupaten/Kota memperoleh Opini WTP sedangkan pada tahun 2020 10 Kabupaten/Kota memperoleh Opini dari BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan perasentase 90.90% sesuai dengan target yang ditetapkandan sesuai dengan sasaran strategis kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi yaitu meningkatnya Transparans dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, Badan Keuangan dan Daerah Mempunyai Unit Pelaksana Teknis yang tugas dan kedudukannya untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat dibidang Pajak, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi melalui UPTD PPD Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi terus melakukan Peningkatan Kualitas dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat karena pada hakekatnya tugas pokok pemerintah adalah memberikan Pelayanan pada Masyarakat, untuk mengetahui kualitas dalam pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melaksanakan Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan



Publik secara berkala melalui penyusunan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang digunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsure pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan dalam meningkatkan kualitas.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berisi data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperolah dari hasil pengukuran secara Kuantitatif dan Kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dengan membandingkan harapan dan kebutuhan.

Dalam semester II Tahun 2020 dalam laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Keuangan melakukan survey dengan hasil mutu pelayanan berdasarkan Indek sebagai berikut :

Tabel 2. 6. Tabel Kategori Mutu Pelayanan

NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25, 00- 64,99	D	Tidak Baik
65,00- 76,60	C	Kurang
76,61- 88,30	B	Baik
88,31-100,00	A	Sangat Baik

Dari keseluruhan Kuisioner (300 Kuisioner) dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut, dari hasil pengolahan terhadap kuisioner yang telah terisi tersebut diperoleh hasil berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh hasil Skor **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): 86,56** dengan angka Indek sebesar B, maka Kinerja Unit Pelayanan ini berada dalam Mutu Pelayanan B dengan Kategori Baik, Karena berada dalam nilai Interval Indeks Kepuasan Masyarakat: **76,61- 88,2330**

Perolehan Penilaian tergambar dalam Tabel 2.7. :



Tabel 2. 7. NRR 9 Unsur Pelayanan

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	Persyaratan Pelayanan	3,956
2	Prosedur Pelayanan	3,833
3	Waktu Pelayanan	3,718
4	Biaya/Tarif	3,.779
5	Produk/Hasil Pelayanan	3,769
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,846
7	Prilaku Petugas Pelayanan	3,778
8	Maklumat Pelayanan	3,771
9	Mekanisme Pengaduan Pelayanan	4,078

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi**



Tabel 2. 8. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PER UNSUR LAYANAN SEMESTER II

NO	KANTOR PPPD	UNSUR PELAYANAN									NRP TTB	IKM / UNIT	MUTU PELAYANAN	KETERANGAN
		U 1	U 2	U 3	U 4	U 5	U 6	U 7	U 8	U 9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	KOTA JAMBI	0,392	0,385	0,377	0,377	0,370	0,403	0,374	0,374	0,429	3,481	86,86	B	BAIK
2.	KABUPATEN MUARO JAMBI	0,381	0,377	0,366	0,411	0,389	0,385	0,374	0,370	0,407	3,460	86,50	B	BAIK
3.	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	0,396	0,381	0,377	0,385	0,377	0,389	0,381	0,377	0,396	3,459	86,30	B	BAIK
4.	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	0,396	0,366	0,389	0,385	0,385	0,400	0,370	0,389	0,385	3,465	86,39	B	BAIK
5.	KABUPATEN BATANGHARI	0,411	0,392	0,374	0,392	0,377	0,366	0,381	0,381	0,392	3,466	86,49	B	BAIK
6.	KABUPATEN TEBO	0,403	0,377	0,370	0,355	0,381	0,381	0,381	0,385	0,437	3,470	86,75	B	BAIK
7.	KABUPATEN SAROLANGUN	0,422	0,385	0,348	0,381	0,381	0,385	0,389	0,381	0,403	3,475	86,67	B	BAIK
8.	KABUPATEN MERANGIN	0,403	0,389	0,385	0,377	0,366	0,389	0,392	0,363	0,400	3,464	86,39	B	BAIK
9.	KABUPATEN BUNGO	0,407	0,396	0,363	0,363	0,381	0,385	0,381	0,374	0,422	3,472	86,58	B	BAIK
10.	KABUPATEN KERINCI	0,411	0,385	0,377	0,377	0,366	0,385	0,389	0,377	0,407	3,474	86,67	B	BAIK
	JUMLAH IKM PER CPPD	4,022	3,833	3,726	3,803	3,773	3,868	3,812	3,771	4,078	34,686	865,600		
	IKM UNIT PELAYANAN BAKEUDA PROV. JAMBI											86,56	B	BAIK



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintah Pusat yang bersih dan akuntabel serta Pemerintah Daerah yang tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan daya saing yang sehat antar daerah sehingga terwujud kesatuan bangsa baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa.Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, telah diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa sistem keuangan berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Dalam melaksanakan Tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi sebagai Badan Pengelolaan Keuangan tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Dewasa ini, kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan umumnya mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset :



1. Meningkatkan PAD agar pertumbuhannya lebih besar dibandingkan pertumbuhan dana transfer sehingga kontribusi PAD terhadap pendapatan lebih besar dengan cara :
 - Perbaikan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah,
 - Menggali potensi PAD dari sektor pajak selain PKB dan BBNKB,
 - Menggali potensi retribusi daerah,
2. Peningkatan Sumber daya manusia sebagai Pengelola keuangan agar lebih diperioritaskan demi tercapainya target Realisasi Pendapatan,
3. Melaksanakan pendataan objek pajak kendaraan bermotor terkait wajib pajak yang belum melakukan pendaftaran ulang dengan membentuk Tim Terpadu melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota se-provinsi Jambi,
4. Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi,
5. Pemantapan sistem operasional prosedur pengelolaan keuangan yang tepat waktu,
6. Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bagi aparatur,
7. Pemantapan ketepatan waktu pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengacu pada Sistem Operasional Prosedur,
8. Pemantapan kualitas dan peningkatan persentase ASN yang memenuhi kualifikasi standar dan tingkat akurasi data BMD yang disajikan dalam LBMD,
9. Mendorong SKPD untuk lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan DAK dan TP,
10. Melakukan koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan potensi DBH dan DID.



BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan Misi Kepala Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam rangka menunjang Rencana Kerja Pembagunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN), Pemerintah Provinsi Jambi melalui Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih telah merumuskan **Visi** dan **Misi** untuk membantu program kerja menuju suksesnya rencana strategis Provinsi Jambi menuju **JAMBI MANTAP**, adapun Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI JAMBI MANTAP

**“TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB,
AMANAH DAN PROFESIONAL DI BAWAH RIDHO ALLAH SWT”**

MISI JAMBI MANTAP

- 1. MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN**
- 2. MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN DAERAH**
- 3. MEMANTAPKAN KUALITAS SDM**

Visi dan Misi JAMBI MANTAP yang telah ditetapkan dan menjadi janji Politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dirumuskan untuk mencapai cita-cita yang bertujuan :



1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas,
2. Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.

Berdasarkan Visi dan Misi diatas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi sesuai Tugas dan Fungsi terus berupaya melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap peningkatan pendapatan daerah serta tata kelola keuangan sesuai koridor dan peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan dan menunjang hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi telah menetapkan Visi dan Misi yaitu

VISI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI :

“TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH DAN TATA KELOLA KEUANGAN SECARA TERTIB, EFEKTIF, EFISIEN”

3.2. Tujuan dan sasaran

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memegang peranan penting dalam pembangunan serta sebagai ujung tombak dalam pembiayaan jalannya pembangunan di Provinsi Jambi dalam mengelola potensi-potensi yang akan menjadi sumber Pendapatan Daerah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk menjalankan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



Provinsi Jambi sesuai tugas dan fungsinya mempunyai tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dengan tujuan yang akan dicapai antara lain :

- ❖ Meningkatkan kualitas SDM, Sarana dan Prasarana Perkantoran, Kualitas Kelembagaan, Tata laksana dan pelayanan adminitrasi perkantoran
- ❖ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabilitas dan partisipati
- ❖ Meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah untuk pembiayaan pembangunan
- ❖ Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
- ❖ Terlaksanannya Peningkatan kualitas SDM Sarana dan Prasarana Perkantoran, Kualitas Kelembagaan, Tata laksana dan pelayanan adminitrasi perkantoran
- ❖ Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabilitas dan partisipatif
- ❖ Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3. 1. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2021
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%
		Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapat WTP	100%	90,90%	90,90%
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Porsi PAD Terhadap Penerimaan Daerah	5%	4,91%	98,33%
3.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.	Skor IKM	85	86,56	102%
		Nilai AKIP	72	75,11	104%

3.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023

Rencana Program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi untuk 1 tahun yaitu Tahun Anggaran 2023 terdiri Program dan Kegiatan Pokok dan rutinitas perkantoran, Program dan Kegiatan Lintas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Jambi



serta kegiatan dan subkegiatan pendukung lainnya dapat dilihat sebagai berikut :

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
 - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
 - c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.
 - d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c. Pemindahan Tugas ASN.



- d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
 - e. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
 - f. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - b. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - c. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - d. Pembangunan Gedung Kantor.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.



- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

b. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 9. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
 - d. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan.
 - e. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.
 - f. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi.
- 10. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota.
 - b. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kabupaten/Kota.
 - c. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.



- d. Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

11. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
- b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
- c. Penatausahaan Pembiayaan Daerah.
- d. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.

12. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi.
- c. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.
- e. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.

13. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah.
- b. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.



- c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
 - d. Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi.
14. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.
- a. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi.
- c. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
15. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- a. Penyusunan Standar Harga.
 - b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah.
 - c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.
 - d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - e. Penatausahaan Barang Milik Daerah.
 - f. Inventarisasi Barang Milik Daerah.
 - g. Pengamanan Barang Milik Daerah.
 - h. Penilaian Barang Milik Daerah.
 - i. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - j. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
 - k. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
 - l. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
 - m. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
16. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- a. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.



- b. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
- c. UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kota Jambi
- d. UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Muaro Jambi
- e. UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Batanghari
- f. UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjab Barat
- g. UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjab Timur
- h. UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tebo
- i. UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Bungo
- j. UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Sarolangun
- k. UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Merangin
- l. UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Kerinci
- m. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
- n. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah.
- o. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
- p. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

A. Program dan Kegiatan Lintas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi sebagai Koordinator Pendapatan Daerah serta Pengelolaan Keuangan Daerah telah melakukan langkah-langkah dalam meningkatkan tata kelola keuangan serta pendapatan daerah



Adapun langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah adalah melalui Intensifikasi dan Eksentifikasi untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan serta melaksanakan koordinasi dengan dinas instansi dan mitra kerja, disamping itu juga dalam rangka peningkatan pendapatan daerah serta pengelolaan keuangan daerah diperlukan sarana dan prasarana, pelayanan publik, kualitas aparatur, dan peningkatan kualitas informasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan PAD agar pertumbuhannya lebih besar dibandingkan pertumbuhan dana transfer sehingga kontribusi PAD terhadap pendapatan lebih besar dengan cara :
 - Perbaikan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah
 - Menggali potensi PAD dari sektor pajak selain PKB dan BBNKB
 - Menggali potensi retribusi daerah.
2. Peningkatan Sumber daya manusia sebagai Pengelola keuangan agar lebih diperioritaskan demi tercapainya target Realisasi Pendapatan.
3. Melaksanakan pendataan objek pajak kendaraan bermotor terkait wajib pajak yang belum melakukan pendaftaran ulang dengan membentuk Tim Terpadu melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota se-provinsi Jambi.
4. Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi.
5. Pemantapan sistem operasional prosedur pengelolaan keuangan yang tepat waktu.
6. Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bagi aparatur.
7. Pemantapan ketepatan waktu pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengacu pada Sistem Operasional Prosedur.



8. Pemantapan kualitas dan peningkatan persentase ASN yang memenuhi kualifikasi standar dan tingkat akurasi data BMD yang disajikan dalam LBMD.
9. Mendorong SKPD untuk lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan DAK dan TP.
10. Melakukan koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan potensi DBH dan DID.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perkembangan Pandemi Covid-19 di Indonesia diperkirakan pada Tahun 2022 masih berlangsung dan masih berdampak pada banyak aspek, yaitu antara lain aspek sosial dan ekonomi. Kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home* yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini, mengakibatkan beberapa sektor, antara lain industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Tentunya hal ini memiliki dampak yang begitu besar pada perekonomian negara baik itu dalam skala makro maupun mikro.

Faktor lain yang juga memberatkan yaitu beban Keuangan yang ditanggung oleh masyarakat khususnya pada tingkatan ekonomi menengah kebawah semakin terasa. Oleh karena itu sejumlah kebijakan dan langkah-langkah antisipatif telah dilakukan oleh pemerintah, baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 ini. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi juga telah melakukan kebijakan penyesuaian yang menitik beratkan pada program penanggulangan dampak yang diakibatkan Pandemi Covid-19 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perppu tersebut secara garis besar membahas dua hal, Pertama kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kedua adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan Negara.



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi membuat rumusan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 dengan menyesuaikan antara kebutuhan dengan proyeksi anggaran yang tersedia. Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada table berikut:



Tabel 4. 1 Rumusan Rencana BPKPD Tahun Anggaran 2023

Program dan Kegiatan	Rencana Kerja Tahun-2023		Tahun-2024	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
	Rp	Sumber Dana	Rp		
1	2	3	3	4	5
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN	1.578.269.106.259		1.794.294.232.876		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	133.218.711.308		146.771.732.723	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1.071.179.263	PAD	1.347.446.524	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	348.202.962	PAD	487.484.147	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	431.256.301	PAD	539.070.376	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	291.720.000	PAD	320.892.000	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	113.470.076.900	PAD	124.817.084.800	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	112.453.978.300	DAU	123.699.376.200	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	912.483.400	PAD	1.003.731.800	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	103.615.200	PAD	113.976.800	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	1.114.784.545	PAD	1.226.262.999	BPKPD Provinsi Jambi	Jambi

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi**



Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	121.000.150	PAD	133.100.165	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	455.887.645	PAD	501.476.409	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	141.897.679	PAD	156.087.447	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	197.999.866	PAD	217.799.852	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	197.999.205	PAD	217.799.126	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		PAD		BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>1.354.600.000</i>	PAD	<i>1.552.060.000</i>	<i>BPKPD Provinsi Jambi</i>	<i>Jam bi</i>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	248.000.000	PAD	334.800.000	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	386.100.000	PAD	424.710.000	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Pemindahan Tugas ASN	88.000.000	PAD	96.800.000	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	275.000.000	PAD	302.500.000	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	165.000.000	PAD	181.500.000	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	192.500.000	PAD	211.750.000	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>5.640.600.800</i>	PAD	<i>6.204.661.200</i>	<i>BPKPD Provinsi Jambi</i>	<i>Jam bi</i>

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi**



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	281.204.000	PAD	309.324.400	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.986.225.600	PAD	2.184.848.200	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	936.547.100	PAD	1.030.201.900	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.589.869.500	PAD	1.748.856.500	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	161.886.100	PAD	178.074.800	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Fasilitasi Kunjungan Tamu	174.966.000	PAD	192.462.600	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	509.902.500	PAD	560.892.800	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.656.225.600	PAD	1.821.848.200	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.656.225.600	PAD	1.821.848.200	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		PAD		BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	PAD		BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.777.789.200	PAD	3.055.568.300	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	81.849.200	PAD	90.034.200	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.587.243.400	PAD	1.745.967.800	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi**



Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.108.696.600	PAD	1.219.566.300	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	6.133.455.000	PAD	6.746.800.700	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.799.560.400	PAD	1.979.516.500	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.799.560.400	PAD	1.979.516.500	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	406.644.700	PAD	447.309.200	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.127.689.500	PAD	2.340.458.500	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.416.788.276.8 68	PAD	1.616.049.712. 287	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	3.141.334.329	PAD	3.479.858.802	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	326.893.730	PAD	343.238.417	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.689.763.328	PAD	1.774.251.494	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	290.387.614	PAD	319.426.376	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	231.311.930	PAD	379.667.015	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	353.320.000	PAD	388.652.000	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	249.657.727	PAD	274.623.500	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi



Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.258.692.419	PAD	1.384.561.661	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	345.151.832	PAD	379.667.015	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kabupaten/Kota	284.905.840	PAD	313.396.424	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	332.729.859	PAD	366.002.845	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	295.904.888	PAD	325.495.376	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Koordinasi dan Pengelolaan Perpendaharaan Daerah	1.978.558.478	PAD	2.331.746.562	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	409.783.548	PAD	532.718.612	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	490.429.000	PAD	570.652.000	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	682.700.930	PAD	762.700.950	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	395.645.000	PAD	465.675.000	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	951.114.598	PAD	1.130.168.219	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,Pembiayaan,Pendapatan-LO, dan Beban	220.319.013	PAD	286.414.716	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi**



Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	398.783.592	PAD	478.540.310	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	125.205.881	PAD	137.726.469	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	66.608.201	PAD	73.269.021	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	140.197.911	PAD	154.217.702	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<i>1.408.964.243.102</i>	PAD	<i>1.607.130.176.312</i>	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	147.102.079	PAD	147.102.079	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	350.000.000.000	PAD	472.500.000.000	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	311.502.895.801	PAD	312.437.404.489	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	747.314.245.222	PAD	822.045.669.744	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
<i>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</i>	<i>494.333.943</i>	PAD	<i>593.200.731</i>	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	494.333.943	PAD	593.200.731	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
<i>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</i>	<i>9.056.137.475</i>	PAD	<i>10.837.330.266</i>	<i>BPKPD Provinsi Jambi</i>	<i>Jam bi</i>
<i>Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>9.056.137.475</i>	PAD	<i>10.837.330.266</i>	<i>BPKPD Provinsi Jambi</i>	<i>Jam bi</i>

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi**



Penyusunan Standar Harga	513.548.353	PAD	616.258.024	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	633.548.353	PAD	760.258.024	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	433.172.320	PAD	519.806.784	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	333.548.353	PAD	400.258.024	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Penatausahaan Barang Milik Daerah	873.548.353	PAD	1.048.258.024	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Inventarisasi Barang Milik Daerah	747.230.830	PAD	896.676.996	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Pengamanan Barang Milik Daerah	2.650.173.517	PAD	3.150.173.517	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Penilaian Barang Milik Daerah	347.494.792	PAD	416.993.750	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	374.132.382	PAD	448.958.858	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	646.891.964	PAD	776.270.357	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	333.548.353	PAD	400.258.024	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	633.548.353	PAD	760.258.024	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	535.751.551	PAD	642.901.861	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	19.205.980.609	PAD	20.635.457.600	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi**



Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	19.205.980.609	PAD	20.635.457.600	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1.098.005.180	PAD	1.152.905.439	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	7.078.223.306	PAD	7.361.352.239	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kota Jambi	744.442.859,04	PAD/HIBAH JR	767.876.192,02	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Muaro Jambi	432.633.034,80	PAD/HIBAH JR	458.125.701,02	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Batanghari	432.633.034,80	PAD/HIBAH JR	458.125.701,02	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjab Barat	432.633.034,80	PAD/HIBAH JR	458.125.701,02	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjab Timur	409.729.664,52	PAD/HIBAH JR	435.113.310,70	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tebo	475.122.779,17	PAD/HIBAH JR	500.817.696,57	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Bungo	553.612.237,02	PAD/HIBAH JR	579.680.764,25	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Sarolangun	515.883.632,32	PAD/HIBAH JR	541.772.571,38	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Merangin	552.381.885,26	PAD/HIBAH JR	578.444.556,01	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Kerinci	552.381.885,26	PAD/HIBAH JR	578.444.556,01	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-	PAD/HIBAH JR	5.356.526.750	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi**



Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4.110.260.351	PAD	4.726.799.403	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	624.671.768	PAD	655.905.356	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	563.676.317	PAD	620.043.949	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	629.689.640	PAD	761.924.464	BPKPD Provinsi Jambi	Jam bi



BAB V
PENUTUP

Pembangunan adalah perubahan yang bersifat dinamis (*a dynamic change*), Pembangunan bertujuan melaksanakan perubahan, tidak hanya terjadi pada sekelompok orang atau pada suatu wilayah saja, tetapi berlangsung dalam seluruh masyarakat (*a whole society*), seluruh wilayah, perubahan itu berlangsung secara bertahap, dari suatu keadaan yang belum baik menuju perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Pada hakekatnya, pembangunan yang paling utama adalah pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan prasarana dan sarana dilakukan hanya untuk menunjang kegiatan manusia dalam pembangunan. Pembangunan berlangsung selalu berubah. Dalam hal ini, pembangunan tidak hanya menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam masyarakat yang berubah itu, tetapi juga berperan untuk melakukan perubahan atau mengarahkan perubahan tersebut. Untuk itu, diperlukan instrumen dan strategi yang harus sesuai dengan kelompok sasaran (*target group*) dan strategi induk yang dipilih.

Karena pembangunan meliputi seluruh masyarakat, pembangunan mencakup berbagai sisi kehidupan maka diperlukan perencanaan yang baik dan berkesinambungan.

Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. RKPD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi. Rencana Kerja ini disusun sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2023. Selain itu, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, dan juga jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Visi dan Misi



Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana ini akan dijadikan pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan BPKPD Provinsi Jambi tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan Renja BPKPD Provinsi Jambi tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan-karyawati Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi

Jambi, Januari 2022

KEPALA BADAN

**AGUS PIRNGADI,S.sos
Pembina Utama Muda
Nip. 19691215 199003 1 005**